

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi pengurus suatu perusahaan (direksi dan komisaris) dan laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik perusahaan. Namun, dengan semakin besarnya keterlibatan pihak lain, yakni investor (pemilik), pemberi pinjaman (kreditur), pemasok (kreditur usaha lainnya), pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat, laporan keuangan digunakan sebagai informasi *asymetry*, yaitu suatu kondisi dimana informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Seperti informasi yang dimiliki oleh direksi perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Sehingga dengan adanya laporan keuangan, informasi akan tersebar secara merata antara pengelola dan pemilik perusahaan.

Informasi laporan keuangan digunakan oleh investor atau pemilik sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Manajemen misalnya untuk membuat keputusan dalam menahan atau menjual investasi atau keputusan untuk mengangkat atau mengganti manajemen. Disamping itu, manajemen mempunyai tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin tinggi pula bonus yang didapat oleh manajemen. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pihak manajemen sebagai pemilik (*stakeholders*) dalam mengestimasi *earning power* (kekuatan laba) untuk menaksir risiko dalam

investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh (Herdawati, 2015).

Kusumawati dan Sasongko (2005) dalam Dandy (2016) mengatakan bahwa diantara pihak eksternal dan internal, sebagai pengguna laporan keuangan, di dalam suatu perusahaan terkadang terdapat berbagai kepentingan sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Pertentangan itu terjadi karena pihak manajemen berusaha untuk meningkatkan kekayaannya. Selain itu, pihak manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberikan kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta pihak manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Hal tersebut yang mendorong pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Manajemen laba terjadi karena adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Konsep ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Manajemen berusaha mengecilkan laba untuk mengecilkan pembayaran pajak sesuai yang diinginkan. Upaya untuk meminimalkan beban pajak secara *eufemisme* ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhir proses perencanaan pajak ini menyebabkan utang pajak, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini masih berada di dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak pada perusahaan bisa dilakukan dengan dua cara yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pelanggaran pajak (*tax evasion*). Tetapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperbolehkan berupa pelaksanaan perencanaan pajak yang tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perpajakan, yaitu berupa penghindaran pajak. Sedangkan pelanggaran pajak (*tax evasion*) tidak diperbolehkan dalam perpajakan, karena tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan, tindak kriminal di bidang perpajakan dan bersifat illegal.

Selain perencanaan pajak yang diduga mempengaruhi manajemen laba, beban pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnawarman (2012) dalam Ratna dan Titik (2016) bahwa alasan penghematan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan

teori akuntansi positif, yaitu *Political Cost Hypothesis* sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, menunda pendapatan dan mempercepat biaya untuk menghemat pajak salah satunya dengan merekayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan manajemen laba.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada PSAK dan Peraturan Perpajakan. Dalam menyiapkan laporan keuangan, manajemen membutuhkan penilaian dan perkiraan. Hal ini memberikan manajemen fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangannya. Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam PSAK No. 1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (*accrual basis*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1997 menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) yang mulai diterapkan pada tahun 2001. Sebelum diberlakukannya PSAK No.46 tersebut, perusahaan hanya menghitung dan mengakui besarnya beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan saja tanpa menghitung dan mengakui pajak tangguhan (Margaretha, 2016).

Adapun praktik manajemen laba yang dilakukan oleh Toshiba Corporation yang merupakan perusahaan elektronik berasal dari Jepang dengan reputasi sangat baik awalnya. Namun, reputasi yang bagus menjadi hancur karena *pressure* yang sangat tinggi untuk memenuhi *target performance* unit. Kasus ini terjadi pada tahun 2015. Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor

dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga *overstated profit* 1,2 Miliar US Dollar sejak tahun fiskal 2008.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba sudah lumrah dilakukan oleh para manajer untuk menghindari melaporkan kerugian dengan berbagai motivasi manajemen laba. Berikut adalah ringkasan ketidakkonsistenan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yang diperlukan penelitian lebih lanjut. Perbedaan hasil tersebut diringkas dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Independen					Variabel Dependen
			PP	BPT	APT	KM	UP	ML
1	Ferry Aditama	2013	X	-	-	-	-	V
2	Inasa Singkianti	2015	X	X	X	-	-	V
3	Widyasenja dkk	2015	V	X	-	-	-	V
4	Herdawati	2015	V	V	-	-	-	V
5	Hellen Hermanto	2016	V	X	-	-	-	V
6	Dewa dan Made	2016	V	-	-	X	X	V
7	Ratna dan Titik	2016	V	V	-	-	-	V

Sumber: Skripsi & jurnal

Keterangan:

PP	: Perencanaan pajak	BPT	: Beban pajak tangguhan
APT	: Aset pajak tangguhan	KM	: Kepemilikan manajerial
UP	: Ukuran perusahaan	ML	: Manajemen Laba
V	: Berpengaruh	X	: Tidak berpengaruh
-	: Tidak diteliti		

Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu, terkait dengan topik tersebut peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan mengacu pada penelitian Herdawati (2015). Peneliti akan meneliti dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2015”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

4. Seberapa besarkah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.
- b) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Variabel bebas terdiri dari perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Variabel terikatnya adalah manajemen laba.
- c) Penelitian ini meneliti pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

3. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.
4. Untuk menguji seberapa besar pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan terkhusus pada perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan tindakan manajemen pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.

- b. Bagi manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen dalam meningkatkan persepsi positif kepada pengguna laporan keuangan terhadap kualitas laba akuntansi yang dilaporkan melalui perbedaan temporer dan perencanaan pajak.

- c. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada Panduan Penyusunan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan didukung penelitian terdahulu yang berhubungan dengan manajemen laba, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang memuat masalah dalam penelitian, yaitu pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan informasi lain yang mendukung dalam penelitian ini, *review* penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang proses seleksi sampel, deskripsi hasil penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasannya.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.